

**MODEL EVALUASI
BERBASIS STANDAR KOMPETENSI KEAHLIAN KEJURUAN
PADA KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN**

(Dedy Suryadi, M.Pd., Staf Pengajar JPTS FPTK UPI)

Pendahuluan

Pendidikan menengah kejuruan sebagai bagian dari sub sistem pendidikan di Indonesia, sesuai dengan UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 pada pasal 15 yang menegaskan bahwa: “Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu”. Berdasarkan penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa orientasi utama tamatan adalah untuk bekerja atau berwirausaha secara mandiri sesuai bidang kejuruan yang ditekuninya. Dengan demikian sistem pendidikan yang dibangun pun berorientasi pada sistem yang berkembang di dunia usaha dan dunia industri (DUDI), sehingga model pembelajarannya setidaknya mendekati suasana dan kondisi yang nyata terdapat di DUDI tersebut.

Meskipun sekarang pemerintah sekarang ini akan meningkatkan proporsi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan dengan promosi SMK secara gencar baik melalui media cetak, elektronik maupun dengan gelaran lomba keterampilan siswa di berbagai tingkatan, namun kajian terhadap perkembangan di seputar pendidikan menengah kejuruan (SMK) menunjukkan banyak kritik terhadap eksistensinya. Kritik tersebut bermuara pada permasalahan-permasalahan yang mengemuka, yang terjadi baik pada lingkungan internal maupun eksternal SMK. Pada lingkungan internal permasalahan meliputi: (1) kualitas pendidikan di SMK pada umumnya dinilai rendah, (2) kurikulum yang digunakan belum sesuai dengan dunia kerja (*deman driven*), (3) implementasi kurikulum dalam bentuk penyelenggaraan proses pendidikan, pelatihan dan evaluasi hasil diklat belum terlaksana sesuai tuntutan kurikulum. Penelitian Sumardi (2002), Suherman dan Yayat (2003) pada SMK menunjukkan implementasi kurikulum belum sesuai dengan tuntutan kurikulum yang telah ditentukan, (4) pengelolaan kurikulum masih bersifat sentralistik dan sedikit memberi ruang gerak sekolah dan guru dalam mengembangkannya, (5) rendahnya tingkat performansi kerja

lulusan SMK di lapangan kerja, sebagian saja yang mempunyai kemampuan dan prestasi kerja yang dipersyaratkan (Agnes: 2002-36), (6) kualitas tamatan SMK sebagian besar belum mencapai kompetensi-kompetensi standar kerja minimal yang dipersyaratkan, dan (7) tamatan SMK belum memiliki kemampuan daya suai dan kemandirian dalam bekerja. Hal ini diperkuat hasil penelitian Munawar (2001:37) yang mengungkapkan bahwa sebagian besar siswa SMK cenderung bersikap kurang positif terhadap wiraswasta dan rendah kreativitasnya.

Pada lingkungan eksternal, permasalahan yang mengemuka adalah sebagai berikut : (1) iklim dunia usaha dan dunia industri yang cenderung stagnan dan lambat dalam perkembangannya, (2) rendahnya daya serap industri terhadap tamatan SMK, (3) penghargaan dan pengakuan yang kurang dari dunia industri yang menjadi pemakai tamatan SMK, dimana menurut Djojonegoro (1998:19), dunia industri lebih menyukai tamatan SMA untuk pekerjaan yang seharusnya menjadi pekerjaan tamatan SMK, dan tamatan SMK digaji sama dengan tamatan SMA. Menurut Lumempouw (INKINDO: 2003), banyak lulusan SMK tersisih karena porsi kerjanya diisi oleh teknisi/tukang yang belajar secara otodidak secara turun temurun, selain itu penghargaan status pada tingkat teknisi dan asisten ahli tidak jelas di tengah masyarakat jasa konstruksi, (4) Belum semua industri memiliki standar kompetensi kerja dan model penilaian kompetensi kerja yang standar yang dimiliki, (5) Sebagian besar dunia usaha dan dunia industri belum sepenuhnya melibatkan diri dalam penyelenggaraan pendidikan di SMK, dan (6) nilai tingkat balikan (*internal rate return*) tamatan SMK lebih rendah dibanding tamatan SMA yang lebih tinggi efisiensi eksternalnya (Budiono dan McMahon, 1989).

Reformasi pendidikan menengah kejuruan yang telah digulirkan semenjak Pelita I tahun 1969-1974 sampai dengan tahun 2004 sekarang ini membawa perubahan khususnya pada orientasi paradigma pengembangan SMK yang *market driven*, mengacu pada standar kompetensi kerja yang berlaku di industri, dan tamatan atau *drop out* yang mampu bekerja secara mandiri atau mengisi formasi pekerjaan di lapangan. Selain itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya perkembangan dan percepatan dalam perubahan teknologi dan perubahan tatanan ekonomi dunia yang global yang berdampak pada tuntutan akan adanya sumber daya manusia (SDM) yang

memiliki keunggulan dan kompetensi standar yang dipersyaratkan oleh kalangan dunia usaha dan dunia industri.

Perubahan kurikulum pun dilakukan diawali kurikulum SMK 1964, kurikulum 1976, kurikulum 1984, kurikulum 1994 dan kurikulum 1994 yang disempurnakan (kurikulum edisi 1999), kurikulum 2004, dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang diberlakukan mulai tahun ajaran 2006. Perbaikan dan pembaharuan yang telah dilakukan ternyata tidak serta merta mampu menjawab permasalahan yang berkembang di seputar penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan yang berorientasi pada lapangan kerja.

Signifikansi Evaluasi Kompetensi Kejuruan

Berdasarkan kajian terhadap perkembangan SMK, kurikulum yang digunakan, implementasi serta relevansinya dengan tuntutan dan kebutuhan dunia industri sampai saat ini, hampir keseluruhan aspek penyelenggaraan pendidikan di SMK memiliki masalah-masalah tersendiri. Mengingat bahwa SMK ini dalam operasionalnya senantiasa bersinggungan dengan dunia industri, maka perlu dibangun satu pemahaman yang sama khususnya yang berkaitan dengan kompetensi yang perlu dikuasai tamatan SMK dan kualifikasi yang disyaratkan oleh dunia industri.

Salah satu aspek pendidikan yang bisa menyelaraskan antara tuntutan kompetensi dunia industri di satu pihak, dan kualifikasi tamatan SMK di pihak lain, adalah aspek evaluasi atau pengukuran kompetensi yang dimiliki tamatan SMK dengan pemahaman dan kriteria yang sama. Untuk itu, penting dan esensial sekali untuk menetapkan suatu model evaluasi yang mengacu pada kriteria standar kompetensi keahlian kejuruan, yang bisa diterima oleh pihak SMK dan dunia industri/asosiasi profesi. Sampai saat ini hanya sebagian kecil model evaluasi yang standar dan bisa digunakan untuk mengukur kompetensi siswa secara nasional. Untuk itu penting sekali dibuat suatu model evaluasi kompetensi yang mengacu pada kriteria-kriteria standar, baik yang digunakan SMK maupun dunia industri atau asosiasi profesi.

Memperkuat pertimbangan mengapa aspek evaluasi kompetensi kejuruan penting dilakukan, sebagaimana temuan penelitian yang dilakukan Witjaksono (2000) yang berkaitan dengan model pengukuran keterampilan kejuruan di SMK, bahwa pengukuran keterampilan kejuruan perlu mengintegrasikan tiga ranah, yakni kognitif,

afektif dan psikomotorik. Hasil lain yang direkomendasikan bahwa evaluasi seharusnya dilaksanakan dengan sistematika pengukuran, yang meliputi keterampilan tahap kognitif dan keterampilan tahap fiksasi, dimana didalamnya meliputi tahapan proses dan produk.

Pertimbangan lain diperoleh dari studi dokumentasi, bahwa dalam dokumen kurikulum, umumnya tidak disertai suatu model evaluasi atau alat ukur yang terstandarisasi dan mampu mengukur tingkat keberhasilan siswa dalam pencapaian kompetensi-kompetensi keahlian standar secara akurat dan obyektif sesuai tuntutan kurikulum yang disyaratkan.

Menurut pendapat yang dikemukakan Furqon (2001), bahwa kegiatan evaluasi harus ditempatkan sebagai salah satu faktor yang menentukan keberhasilan KBM, bukan hanya sebagai cara untuk menilai keberhasilan siswa. Setidaknya hasil evaluasi memiliki tiga fungsi penting, yakni: (1) memberi balikan kepada siswa tentang kemajuan belajar dan kompetensi yang telah dicapainya, sebagaimana pendapat Zainul (1998) yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu evaluasi atau tes akan meningkatkan *self-esteem*, *self-confidence* dan *self-image* siswa, (2) Evaluasi yang diberikan akan mendorong siswa untuk belajar secara lebih baik untuk mencapai hasil belajar dan kompetensi yang lebih baik lagi, dan (3) memberi balikan kepada guru, khususnya memberi informasi tentang keberhasilan guru mengajar dan upaya perbaikan serta peningkatan kemampuan mengajarnya. Di samping itu yang lebih penting lagi adalah keterlibatan DUDI dan asosiasi profesi dalam proses evaluasi dan pengujian kompetensi siswa, sangatlah kecil dan pihak DUDI dan asosiasi profesi pun sebagian besar belum mempunyai suatu model alat evaluasi atau penilaian standar kompetensi kerja baik untuk penyeleksian calon tenaga kerja maupun untuk mengukur kinerja para pekerjanya sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia di lingkungan perusahaannya.

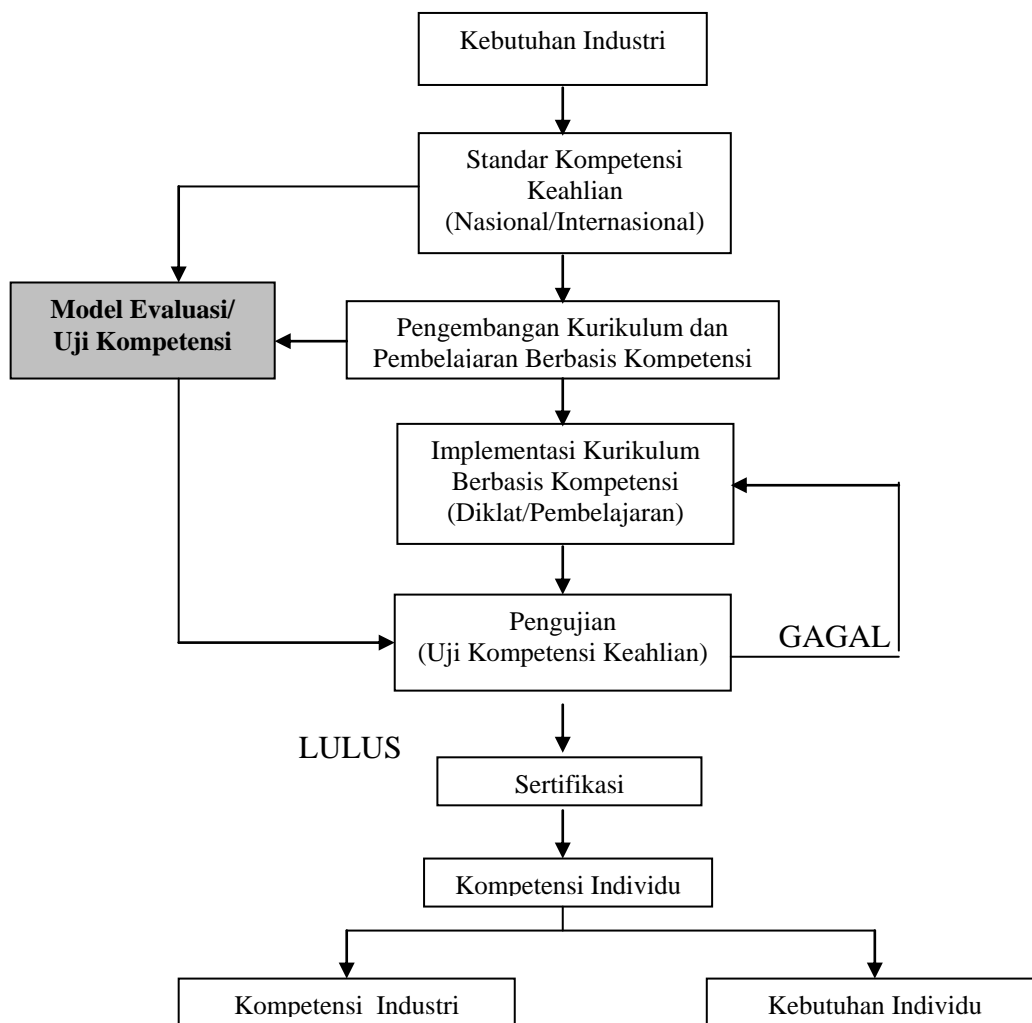
Kurikulum yang dikembangkan pada sekolah menengah kejuruan pada dasarnya menekankan pada beberapa pendekatan pembelajaran, diantaranya pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi, berbasis produksi dan pembelajaran tuntas (*mastery learning*). Ketiga pendekatan pembelajaran tersebut diarahkan merujuk pada upaya pencapaian standar kompetensi keahlian siswa untuk setiap program keahlian.

Alternatif Model Evaluasi Kompetensi Kejuruan

Tolok ukur keberhasilan siswa SMK dalam pencapaian setiap kompetensi dan sub kompetensi keahlian pada proses pembelajaran sebagai bagian dari implementasi kurikulum, adalah seberapa jauh tingkatan kompetensi yang diperoleh mencapai standar kompetensi minimal yang dipersyaratkan. Proses untuk memperoleh informasi tentang kompetensi yang dimiliki siswa dilakukan melalui suatu evaluasi atau penilaian secara komprehensif meliputi aspek-aspek kompetensi keahlian dalam penguasaan/pemahaman *subject matter*, keterampilan teknis kerja dan sikap kerja.

Dengan demikian penting diperoleh suatu model evaluasi yang memiliki validitas (*content validity, criterion-related validity, construct validity*) dan reliabilitas yang tinggi yang mampu memberi informasi secara akurat tentang karakteristik kompetensi objek yang diukur atau dievaluasi. Pentingnya suatu model evaluasi ini harus dipahami sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam kegiatan pembelajaran siswa, sebagai masukan umpan balik (*feed back*) dan dukungan dalam peningkatan mutu kegiatan belajar mengajar. Stiggins (1994:15) memperkuat dengan pendapatnya tentang prinsip evaluasi, yakni *assessment as instruction*, bahwa "*assessment and teaching can be one and the same*".

Model evaluasi dalam kurikulum SMK, mengarahkan evaluasi dalam bentuk uji kompetensi sebagai bagian dari rangkaian keseluruhan implementasi kurikulum, sebagaimana yang diadopsi dari Foyster (2000), yang dipetakan berikut ini.



Gambar Model Evaluasi/Uji Kompetensi Pada Kurikulum SMK

Berdasarkan pada bagan yang digambarkan di atas, model evaluasi berbasis standar kompetensi keahlian kejuruan yang bisa dikembangkan dan digunakan pada SMK untuk berbagai program keahlian, mensyaratkan terpenuhinya bermacam standar pada setiap komponen pendidikan dan pembelajaran. Pelibatan dunia industri, asosiasi profesi, dan pemerintah dalam setiap aspek implementasi kurikulum terutama pada evaluasi kompetensi mutlak diperlukan.

Di sisi lain pada wilayah standar kompetensi kejuruan/keahlian yang berlaku secara nasional maupun internasional yang ditetapkan oleh asosiasi profesi keahlian, merupakan cerminan dari aspek kompetensi yang ditargetkan terpenuhi oleh lulusan SMK. Standar-standar ini tentunya sudah diklasifikasikan secara jelas berdasar jenjang pendidikan, jenjang keahlian baik untuk jenjang pemula, madya dan makhir/ahli, serta

kejelasan job deskripsi/analisis tugas untuk setiap jenjang keahlian. Selain itu pentingnya penghargaan atau remunerasi yang sesuai/layak dari dunia industri dengan tingkatan keahlian dan kesulitan kerja yang dihadapi.

Model evaluasi keahlian/kompetensi kejuruan dikembangkan berpijak pada tujuannya yakni untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap kompetensi standar dan dipersyaratkan, agar dapat dinyatakan ahli dan mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugas-tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensi yang diperolehnya berdasarkan ketentuan dan standar yang berlaku di dunia industri.

Model evaluasi kejuruan yang digunakan mengacu pada pendekatan Penilaian Acuan Patokan (PAP), yakni kriteria standar kompetensi keahlian dengan menitikberatkan pada penguasaan kinerja, sehingga proporsi evaluasinya lebih banyak pada uji tindakan (*performance test*), dibanding pada keterampilan kognitif dan afektif. Tes tindakan ini dilakukan untuk menjamin ketuntasan penguasaan standar kompetensi minimal yang harus dikuasai oleh siswa secara individual. Pada model evaluasi ini dikembangkan pengujian pada tahap *perencanaan kerja, proses kerja dan pada produk akhir dari hasil pekerjaan*.

Merujuk pada model kurikulum kejuruan yang digunakan (kurikulum berbasis kompetensi), maka model ini pun penekanannya lebih pada kompetensi kerja, sehingga model penilaiannya juga berbasis kurikulum. Hal ini sejalan dengan yang dikembangkan oleh Pootet (1995:19), yakni *curriculum-based assesment*. Menurut Pootet, penilaian dengan mendasarkan pada kurikulum merupakan suatu proses menentukan kebutuhan pembelajaran siswa didalam kurikulum dengan secara langsung, menilai keterampilan-keterampilan spesifik seperti yang dinyatakan kurikulum.

Model ini dikembangkan berdasarkan standar-standar kompetensi keahlian pada lapangan pekerjaan tertentu yang berlaku dan disepakati oleh masyarakat industri, asosiasi profesi dan kalangan pendidikan, yang diarahkan pada standarisasi. Penyelenggaraan model evaluasi kejuruan berbasis kurikulum ini dilakukan secara bersama-sama antara sekolah, PT, kalangan industri dan asosiasi profesi, dimana hasil yang diperoleh menjadi dasar atau patokan pemberian sertifikat profesi yang mengacu standar keahlian dan sertifikasi yang berlaku pada bidang profesi yang bersangkutan.

Penutup

Model evaluasi keahlian kejuruan yang dikembangkan di SMK ini menuntut terpenuhinya standar-standar pendidikan lainnya, seperti yang menyangkut kompetensi standar tenaga pengajar, model pengelolaan pembelajaran yang berkualitas, standar bahan pembelajaran, kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang sesuai dengan karakteristik dan suasana yang berkembang di dunia industri. Dalam implementasinya, model evaluasi keahlian kejuruan ini diawali dengan kajian meliputi: (a) pemahaman analisis kebutuhan dunia industri yang berkenaan dengan kualitas dan keterampilan SDM yang disyaratkan, (b) standar kompetensi keahlian yang sudah dibakukan, (c) kurikulum SMK, dan (d) model implementasi kurikulum yang diterapkan.

Berdasarkan kajian tersebut, maka disusunlah kerangka model evaluasi kompetensi dengan langkah-langkah sebagai berikut : (1) merumuskan tujuan diadakannya evaluasi keahlian/kompetensi kejuruan, (2) mengidentifikasi *learning outcomes* yang akan diukur, (3) menentukan *learning outcomes* spesifik yang bisa diamati, (4) memerinci materi kompetensi yang akan diukur dengan alat evaluasi kompetensi, dan (5) membuat tabel-tabel spesifikasi untuk setiap kompetensi keahlian sebagai dasar penyusunan *construct* dan *content* evaluasi kompetensi. Model evaluasi kompetensi dirancang dengan menggunakan pendekatan *criterion-referenced test*, yakni kriteria baku standar performansi dan penguasaan kompetensi keahlian.

Kepustakaan

- Arikunto, Suharsimi. (1993). *Dasar-dasar evaluasi pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Azwar, S. (1997). *Reliabilitas dan validitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Borg, W.R., Gall, M.D. & Gall, J.P. (2003) *Education research, an introduction*. Boston: Pearson Education, Inc.
- Edwards, Allen L. (1957). *Techniques of attitude scale construction*. New York: Appleton Century Croff. Inc.
- Fernandes, H.J.X. (1984). *Testing and measurement*. Jakarta: National Education, Planning, Evaluation and Curriculum Development.
- Finch, C.R, Crunkilton, J.R. (1993). *Curriculum development in vocational and technical education*. Boston: Allyn and Bacon.

- Foyster, J. (2000). *Competency-based training and assessment*. Jakarta: Depdiknas
- Hamalik, O. (2002). *Evaluasi Kurikulum*
- Hasan, Said H. (1985). *Evaluasi Kurikulum*
- Lynton, R.P., & Pareek, U. (1992). *Pelatihan dan pengembangan tenaga kerja*. Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo.
- Miller, J.P., Seller, W. (1985). *Curriculum, perspectives and practice*. New York: Longman.
- Pinder, C.C. (1998). *Work motivation in organizational behavior*. Toronto: Prentice Hall International Inc.
- Pootet, J.A. (1995). *Curriculum-Based Assessment and Programing*. Boston: Allyn and Bacon
- Satgas Mendikbud. (1997) *Keterampilan menjelang 2020 untuk era global*. Jakarta: Depdikbud.
- Sukmadinata, N.S. (2004). *Kurikulum dan pembelajaran kompetensi*. Bandung: Kesuma Karya.
- Wardiman Djojonegoro. (1998). *Pengembangan sumber daya manusia melalui sekolah menengah kejuruan*. Jakarta: PT Jayakarta Agung Offset.
- Witjaksono, U. (2000). Pengembangan Model Pengukuran Keterampilan Kejuruan Siswa SMK Jurusan Teknologi Pengerjaan Logam Bidang Pekerjaan Konstruksi. Tesis Magister pada PPS UPI: tidak diterbitkan.
- Zais, R.S. (1976). *Curriculum, principles and foundations*. New York: Harper&Row, Publishers.
- UU Nomor 20 tahun 2003, tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
- Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMKN 5 Bandung, 2006.